

Obwis Wonogiri Segera Dibuka

WONOGIRI (KR) - Bupati Wonogiri Joko Sutopo mengisyaratkan pihaknya akan membuka kembali objek wisata di daerahnya setelah diturunkan level PPKM dari 3 ke 2. Selain itu, aturan bagi warga yang menggelar hajatan juga akan dilonggarkan sedikit demi sedikit.

"Kalau selama ini pelaksanaan ijab harus dilakukan di balai nikah KUA, sebentar lagi boleh dilangsungkan di rumah," jelasnya usai pelantikan pejabat di Graha Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Wonogiri, Rabu (6/10).

Dikatakan, jika objek wisata dibuka akan ada koordinasi dan pemberitahuan resmi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hal itu dimaksud agar tidak terjadi saat objek wisata dibuka malah abai protokol kesehatan, terjadi kerumunan dan sebagainya.

Menurutnya, selama pandemi Covid-19 ini ada 46 objek wisata di Wonogiri yang ditutup. Jumlah itu merupakan akumulasi destinasi wisata yang dikelola Pemkab maupun pihak lain seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMdes).

"Khusus objek wisata yang dikelola Pemkab, ada enam. Yakni Waduk Gajah Mungkur, Pantai Sembukan Kecamatan Paranggupito, Bumi Kahyangan Dipih Tirtomoyo, Air Terjun Setren Girimanik Slogohimo, Gua Putri Kencono, dan Museum Karst Pracimantoro," ungkap bupati. (Dsh)

DI KABUPATEN TEGAL

Elpiji 3 Kilogram Rp 24.000

SLAWI (KR) - Harga elpiji 3 kilogram di wilayah Kabupaten Tegal saat ini mencapai Rp 24.000, sehingga banyak warga beralih ke tungku kayu bakar. Sejumlah warga Desa Lebaksu, Rabu (6/10), mengaku sangat berat membeli elpiji 3 kilogram karena harganya mahal.

"Sejak sekitar tiga bulan lalu hingga sekarang harga elpiji 3 kilogram antara Rp 23.000 sampai Rp 24.000. Itupun barangnya sering langka di pasaran," ujar Sumiti (54).

Hal sama diungkapkan Ningsih (55) warga Kesuben, bahwa sejak dua bulan lalu hingga kini kegiatan di dapur menggunakan tungku kayu bakar karena kesulitan membeli elpiji 3 kilogram. "Untuk memenuhi kebutuhan kayu bakar, saya membeli dari warga sekitar. Harganya masih bisa dijangkau, sementara warga elpiji sampai Rp 24 ribu, saya merasakan berat," tegas Ningsih.

Seorang perangkat Desa Lebaksu, Suhardi membenarkan bahwa warganya banyak yang beralih ke tungku kayu bakar, karena harga elpiji terlalu mahal. "Selain mahal, sulit dicari di pasaran, sehingga warga banyak yang beralih ke kayu bakar," tandasnya. (Ryd)

KAMPUNG VIRTUAL BINUS EKSPLO KARANANGYAR Promosikan Produk 'Real Factory'

KARANANGYAR (KR) - SMK Bintang Nusantara (Binus) menggelar eksplo produk unggulan peserta didiknya bertajuk Kampung Virtual, Rabu-Kamis (6-7/10). Produk berkualitas *real factory* itu diharapkan masuk ke pasar birokrasi.

Kepala Sekolah SMK Binus, Reno Moeliasari Widyaningrum mengatakan eksplo produk sudah dimulai sejak 2019. Kini sekolahnya ditunjuk Kemendikbud memulai lagi agenda itu di masa pandemi. Ia memastikan penyelenggaraannya sesuai prokes dan menjaga jarak.

"Di sini bukan sekadar *teaching factory* namun *real factory*. Produknya mendapat label dari Badan POM untuk produk kecantikan. Pak Bupati Juliyatmono juga menghadiri pembukaan

eksplo. Saya mempersiapkan Pemda membeli produk hand sanitizer, masker atau lainnya dari siswa SMK. Suvenir itu bisa diberikan kepada tamu pemerintah. Respons beliau luar biasa. Ini memberikan semangat anak-anak juga," kata Widya, sapaan akrab Reno Moeliasari Widyaningrum.

Menurutnya, eksplo tersebut untuk mengasah jiwa entrepreneur peserta didiknya di jurusan farmasi dan keperawatan.

"Bakat anak-anak sangat luar biasa dalam membuat aneka produk kesehatan, makanan dan minuman. Kami mohon arahan agar kegiatan kewirausahaan ini benar-benar dapat membantu siswa," ungkapnya.

Dalam pameran itu, potensial pasar dibuka lebih luas melalui saluran toko on-

line. Pengunjung yang datang ke lokasi dibatasi beberapa gelombang. Umumnya kalangan sendiri dan keluarga siswa. Pihak sekolah juga memiliki jaringan pemasaran di luar negeri yang bersedia membeli produk SMK.

Sementara itu Bupati Karanganyar Juliyatmono akan mengajak perbankan untuk memberikan modal bagi wirausahawan muda dari SMK Bintang Nusantara.

Juliyatmono mengaku kagum setelah melihat berbagai produk *real factory* peserta didik SMK Jurusan Farmasi dan Keperawatan tersebut.

Hasil produknya adalah handsanitizer, sabun cuci, sabun mandi, sabun cuci piring dan aneka magang berbagai olahan makanan dan

minuman. "Potensi anak-anak SMK ini menjadi wirausahawan sangat luar biasa. Saya akan ajak bank untuk memberikan modal bagi anak-anak yang mau berwirausaha," tegasnya.

Dengan adanya bantuan modal, diharapkan para sis-

wa bisa memasarkan dan mengatur keuangan sendiri. "Sambil ditingkatkan produk dan perizinannya, sehingga semua diterima masyarakat. Sekolah seperti ini yang diharapkan menghasilkan enterpreuner muda," ungkapnya. (Lim)



KR-Abdul Alim

Stan UKM di Binus Expo bertajuk Kampung Virtual di Karanganyar.

PROGRAM BPUM DI TEMANGGUNG

BRI Kucurkan Dana Miliaran Rupiah

TEMANGGUNG (KR) - Dana bantuan Rp 4,4 miliar telah dikucurkan BRI Cabang Temanggung pada penerima Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di wilayah Kabupaten Temanggung. BPUM dikucurkan dimaksud untuk membantu dan menjaga keberlangsungan usaha pelaku usaha mikro menghadapi dampak pandemi Covid-19 2019.

Pimpinan Cabang BRI Temanggung, Yetty Indrianingrum mengatakan ada 13 tempat di BRI untuk mencairkan BPUM. Yakni 10 di kantor unit, dua kantor kas dan satu kantor Cabang. "Jumlah penerima terbanyak di Unit Bansari dan paling sedikit di Kantor Kas Hayam Wuruk," jelas Yetty, Kamis (7/10).

Menurutnya, BRI Temanggung mendapat kepercayaan untuk

menyerahkan BPUM kepada 5.499 penerima. Menurut catatan terakhir, 3.701 orang telah mencairkan bantuan tersebut. Tiap penerima mendapatkan Rp 1,2 juta. "Oktober ini BPUM tetap dikucurkan karena ada penerima yang belum mengambalnya," ungkap Yetty.

Disebutkan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah RI (Kemenkop UKM) menetap-

kan ribuan penerima BPUM di Temanggung pada 2021. Dengan nominal bantuan yang disalurkan sebesar Rp 1,2 juta perorang. BPUM memang menjadi bagian program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) oleh Kemenkop UKM.

Kepala Dinas Koperasi, Perdagangan dan UKM Kabupaten Temanggung, Sri Haryanto mengatakan tahun 2020 terdapat 16.400 pelaku usaha ditetapkan sebagai calon penerima bantuan, namun hanya 14.100 UKM yang telah menerima BPUM.

"Sisanya sebanyak 2.300 pelaku usaha diproyeksikan mendapat bantuan pada tahun 2021," jelasnya.

Dikatakan, jumlah penerima BPUM 2021 jumlah ada 1.500 pe-

laku usaha. Meski besaran bantuan berkurang dari Rp 2.400.000 menjadi Rp 1.200.000 perorang, diharapkan bantuan produktif ini dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro di Kabupaten Temanggung.

"Bantuan itu untuk membantu pelaku usaha mikro khususnya. Itu bantuan produktif untuk modal usaha, terutama mereka yang terdampak pandemi dari tahun 2020," tandas Sri Haryanto.

Menurutnya, pengucuran BPUM melalui BRI dan sejumlah bank yang ditunjuk. Terkait hal itu, pihaknya selalu berkoordinasi dengan perbankan untuk mengetahui penerima yang telah mencairkan bantuan. (Osy)

HUKUM

Wajah Anak Tiri Disundut Lidi Panas

SLEMAN (KR) - Anak tiri rewel membuat GY (24) nekat melakukan tindak pidana. Ia menyundutkan lidi yang ujungnya menjadi bara terhadap anak dari istrinya tersebut. Aksi warga Depok Sleman itu, dilakukan saat anak tirinya berinisial N (2,5) sedang tidur bersama ibunya. Korban langsung menangis kencang sehingga membuat ibunya yakni RF, terbangun.

"Ibu korban langsung memukul tangan tersangka yang saat itu masih memegang lidi api. Setelah itu, RF membawa anaknya ke rumah ibunya yang juga nenek korban," ungkap Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Sleman Iptu Yunanto Kukuh Prabowo, Selasa (5/10) siang.

Meskipun tertangkap basah, namun GY beralibi dan tetap tidak mengakui perbuatannya. Ibu kor-

ban, memilih melaporkan suami yang baru dinikahinya sekitar setahun itu, ke Mapolres Sleman setelah melihat sejumlah luka di tubuh anaknya. Mulai dari luka di bibir atas dan bawah serta luka sundutan di kaki.

Kukuh menyebut, GY dipanggil dua kali tidak datang, sehingga langsung dilakukan penangkapan dan penahanan. Saat diperiksa, tersangka mengaku jika ia terlebih dahulu membakar ujung lidi dan ketika sudah menjadi bara, langsung menyundutkan ke tubuh N. Aksi kekerasan itu dilakukan lantaran tersangka merasa jengkel dengan anak tirinya itu karena rewel. "Atas kasus ini GY terancam Pasal 44 UU RI No 23 tahun 2004 dan atau 80 UU RI 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ancaman 5 tahun," tutup Kukuh. (Ayu)



KR- Wahyu Priyanti

Petugas menunjukkan foto hasil print out yang memperlihatkan luka di tubuh korban.

CEMARKAN NAMA BAIK DANDIM

Ketua GNPK RI Dihukum 7 Bulan Penjara

TEGAL (KR) - Terbukti bersalah mencemarkan nama baik Dandim 0712 Tegal, Majelis hakim Pengadilan Negeri Tegal, akhirnya memvonis Ketua Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia (GNPK-RI) Basri Budi Utomo, dengan pidana 7 bulan penjara dan denda.

Dalam svonis yang digelar pada Senin (4/10) menjelang sore itu, hukuman yang dijatuhkan majelis hakim itu lebih ringan 5 bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), dituntut dengan hukuman penjara 1 tahun dan denda Rp 10 juta subsider 1 bulan kurungan.

Ketua Majelis Hakim Toetik Ernawati dalam putusannya menyebutkan, terdakwa terbukti bersalah tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik. Karenanya, dalam putusannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman

pidana selama 7 bulan dan denda Rp 10 juta subsider 1 bulan kurungan. Selain itu, terdakwa juga dinyatakan tetap dalam penahanan. "Dengan berbagai pertimbangan, kami menjatuhkan pidana kepada terdakwa Basri Budi Utomo dengan pidana penjara selama 7 bulan dan denda 10 juta rupiah subsider 1 bulan kurungan," ujar Toetik.

Menanggapi vonis itu, kuasa hukum terdakwa, Dedi Suhardadi mengatakan, terkait langkah selanjutnya, dia akan berkoordinasi dengan Basri Budi Utomo. Namun, para penasihat hukum menganggap keputusan itu tidak selayaknya diberikan.

"Persoalannya bukan soal jangka waktu hukuman. Buat kami kalau pun di hukum sehari dan diterima, artinya salah. Kami menyangkan, menurut kami putusan itu terlalu dipaksakan," tegas Dedi. (Ryd)

Pelaku Pengeroyokan Menyerahkan Diri

SLEMAN (KR) - Polres Sleman menetapkan tiga tersangka terkait pengeroyokan terhadap seorang petugas parkir, SP (44). Pengeroyokan terhadap warga Mlati Sleman itu terjadi di selatan sebuah tempat hiburan malam, tepatnya di Jalan Magelang KM 5,8 Kutu Patran, Mlati Sleman.

Kasubbag Humas Polres Sleman, Iptu Edy Widaryanta, Kamis (7/10), menjelaskan ketiga tersangka yakni DS (28) dan YM (28) keduanya warga Bantul serta AW (29) warga Depok Sleman.

"Ketiga tersangka menyerahkan diri dan mengakui perbuatannya. Penyidik juga langsung melakukan penahanan terhadap ketiganya," ujar Edy.

Dijelaskan, korban bekerja sebagai tukang parkir di sebuah restoran cepat saji yang berada di depan TKP.

Penganiayaan, bermula saat korban yang berada di tempat hiburan malam, ribut dengan rombongan pelaku, Selasa (28/9) dini hari sekitar pukul 02.00.

Korban kemudian keluar dari bar tersebut, diikuti oleh rombongan pelaku. Setibanya di TKP, terjadi cekcok antara korban dengan para pelaku yang berujung penganiayaan.

"Dengan wajah luka-luka, korban pulang ke rumah, kemudian ia bercerita kepada adiknya jika baru saja dipukul beberapa orang lelaki,"

MEDIASI DI PENGADILAN GAGAL

Musda PMI DIY Dipertanyakan

YOGYA (KR) - Musyawarah daerah PMI DIY digelar Gedung DPRD DIY, Sabtu (2/10) tanpa kehadiran PMI Kota Yogya. Dalam Musda tersebut 4 Cabang PMI dari Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul dan Kulonprogo secara aklamasi telah memilih kembali GBPH H Prabksumo SPSi sebagai Ketua PMI DIY 2021-2026. Tanpa kehadiran pengurus PMI Kota Yogya dalam Musda menjadi pertanyaan dan sangat disayangkan. Sebab PMI Kota Yogya punya banyak sekali peran mulai dari Pembinaan Relawan, Layanan Kegawatdaruratan dan lainnya.

"Selain itu PMI Kota Yogya sebagai penyumbang ketersediaan darah terbesar, bahkan satu-satunya PMI di DIY yang mampu melayani donor plasma konvalesen (Covid-19). Dengan kiprahnya yang besar, baru sekali ini dalam sejarah Palang Merah di DIY, PMI Kota Yogya tidak mendapat undangan resmi sebagai peserta Musda," ucap Peserta Muskot PMI Kota 2021 Munif Tauchid S.Psi kepada KR, Selasa (6/10) malam.

Didampingi peserta Muskot lainnya Ag Gatot Bintoro, Kuasa Hukum Suswoto SH MH dan Sri Hendaryo Kunto SH MH, Munif menyebutkan hingga 7 bulan sejak Muskot digelar Maret 2021, Pengurus Terpilih 2021-

2026 dengan Ketua Drs Heroe Poerwadi MA tidak kunjung dilantik oleh Ketua PMI DIY. "Berbagai upaya mendesak pelantikan telah dilakukan. Hingga mediasi dalam gugatan perdata oleh 20-an pengurus PMI Kota terpilih (Penggugat) pada Ketua PMI DIY (tergugat) di PN Sleman juga gagal. Kita siap membacakan gugatan perdata," tegasnya.

Musda PMI DIY, juga tidak luput dari sikap abstain dari Ketua Relawan Forpiss DIY dan aksi walk out dari Relawan TSR DIY. Seperti dilakukan Tristanto selaku Koordinator Forum Relawan Tenaga Sukarela/TSR se-DIY. "Dari PMI Kota tidak hadir, apakah prinsip dasar kesamaan pada Organisasi Palang Merah sudah tidak ada?" tanya Tristanto saat dikonfirmasi melalui telepon.

Dikatakan adanya tudingan relawan melakukan pungli sangat menohok dan seharusnya tak terjadi di PMI. "PMI DIY masih punya PR, harusnya masalah diselesaikan baru Musyawarah Daerah dilaksanakan," tegas Tristanto yang memilih walk out dari Musda dan sempat dibujuk Sekretaris PMI DIY Arief Noor Hartanto untuk masuk kembali.

Suswoto menambahkan meski kehadiran 4 Kabupaten telah memenuhi quorum dan Musda sah secara hu-

ungkap Iptu Edy.

Keluarga, sempat meminta korban agar mau dibawa ke rumah sakit. Namun rupanya korban menolak dan memilih istirahat dengan tidur di rumah. Baru pada keesokan pagi harinya, korban meminta tetangga agar diantar ke rumah sakit.

Tapi setibanya di rumah sakit, nyawa korban tak tertolong. Polisi yang mendapatkan laporan itu, langsung melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Malam hari setelah pengeroyokan itu, ketiga pelaku mendatangi Mapolres untuk menyerahkan diri.

"Motif pengeroyokan ini karena salah paham. Dalam kasus itu penyidik menyita sejumlah potong baju dan celana serta topi sebagai barang bukti," tutupnya. (Ayu)

kum, namun cacat secara prinsip. "PMI Kota tidak dilantik dan tidak diundang Musda, juga permasalahan ini sedang digugat perdata," tegasnya.

Sementara Kuasa Hukum Ketua PMI DIY, Oncan Poerba SH, menyatakan tidak benar PMI Kota Yogya tidak diundang Musda PMI DIY. Panitia telah mengundang Drs Heroe Poerwadi MA selaku Ketua PMI Kota Yogya Terpilih. Namun di hari pelaksanaan yang bersangkutan menearngkan tidak dapat hadir.

"PMI Kota Yogya tetap diberikan hak-haknya secara penuh sesuai AD/ART PMI. Sepanjang belum terbentuk dan disahkannya pengurus PMI Kota Yogya, maka Ketua PMI Kota Yogya terpilih dapat mewakili dan melaksanakan jalannya organisasi PMI Kota Yogya sesuai AD/ART PMI, termasuk mengikuti Musda PMI DIY," jelasnya.

Karena Ketua PMI Kota tidak dapat hadir, berarti dianggap melepaskan hak suaranya dalam Musda. "Selain itu para penggugat secara hukum tidak dapat mengatasnamakan diri sebagai pengurus PMI Kota Yogya karena sudah demisioner, serta belum disahkan oleh PMI DIY karena ada pelanggaran AD/ART dalam pembentukan calon pengurusnya," jelas Oncan. (Vin)